

Wawasan
Halaman 17 dan 21
Edisi Rabu, 25 Maret 2015

■ Penyelidikan Raibnya Rp 22 Miliar Kasda Pemkot KP2KKN Ragukan Polri

MANYARAN - Penanganan penyidikan kasus dugaan korupsi raibnya uang kas daerah (kasda) Pemkot Semarang sebesar sekitar Rp 22 miliar di Bank BTPN oleh penyidik Polda Jateng dan Polrestabes Semarang diragukan. Polri dinilai tak layak menangani penyidikan kasus korupsi.

Tudingan itu diungkapkan,

Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto kepada wartawan menyikapi penanganan kasus dugaan korupsi kasda Semarang, Selasa (24/3). Menurut Eko, Polda Jateng dan Polrestabes Semarang minim prestasi dalam penanganan kasus korupsi dan cenderung tak transparan serta menyeluruh.

"Polisi tidak usah menangan-

ni kasus korupsi. Tidak layak korupsi ditanganinya. Polri sangat minim prestasi penanganan kasus korupsi. Buktinya, banyak SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) oleh Polda selama 2014, atas kasus di Rembang, Karanganyar dan lainnya. Polrestabes Semarang, tidak ada penanganan korupsi yang signifikan dan cenderung

kasus lama. Adapun sekarang menangani seperti kasus korupsi di DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Semarang tak jelas. Tidak ada keterbukaan penanganan oleh Polda dan Polrestabes," kata Eko.

Eko khawatir penanganan kasus hilangnya kasda Pemkot Semarang yang diduga melibatkan sejumlah pihak, baik pe-

jabat, politisi dan pegawai bank tak tuntas serta menyeluruh. Dari perkembangannya, Eko mengatakan, telah ditemukan adanya calon tersangka.

"Kalau hanya pegawai bank dan bawahan jadi tersangka, itu tidak menyeluruh. Kami khawatir itu tidak tuntas dan tak transparan penyidikannya," lanjut Eko.

Terpisah terkait penanganan kasus hilangnya uang kasda, praktisi hukum Semarang, Dani Sriyanto menilai, kasusnya sebaiknya ditangani Kejati Jateng. Menurutnya, hal itu un-

Bersambung ke hal 21 kol 3

KP2KKN (Sambungan hlm 1)

tuk menghindari konflik kepentingan. "Sebaiknya tetap ditangani Kejati Jateng. Karena rentan konflik kepentingan mengingat adanya dua laporan.

■ Terlibat

Sementara, terkait DAK, mantan pegawai DAK yang disebut terlibat, menurut Dani posisinya sebagai 'justice collaborator'. "Kalau jadi 'justice collaborator' maka akan memperoleh pengurangan hukuman serta perlindungan sebagai saksi," katanya.

Kasus raibnya uang kasda di BTPN sebagaimana diketahui

ditangani Polrestabes Semarang, Polda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Dalam prosesnya, Kejati mundur dan menghentikan penyelidikannya karena terlambat dan khawatir dianggap menyerobot.

Namun, kendati menghentikan penyelidikan, Kejati juga tengah membidik kasus terkait yang berada di sejumlah bank lain. Kasus raibnya uang kasda Pemkot Semarang diduga juga terjadi di sejumlah bank lain yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Sementara itu, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengaku akan terus mendorong pihak terkait untuk menyelesaikan kasus hilangnya depos-

ito Pemkot Semarang senilai Rp 22 miliar.

Dirinya bahkan sudah mempercayakan penanganan dan pelaporan kasus ini ke DPKAD. Meski demikian, ia mengaku sempat kaget saat pertama mendengar kabar hilangnya uang tersebut.

"Ya kaget saja mendengarnya. Pasalnya, transaksi di rekening koran tetap berjalan, namun tiba-tiba BTPN tempat Pemkot mendepositokan Kas Daerah tidak mengakuinya," terangnya.

Dijelaskan, dalam hal ini Pemkot adalah korban. Karenanya, ia percaya sepenuhnya aparat kepolisian dapat menuntaskan kasus ini serta mengem-

balikan uang rakyat yang hilang.

Hendi juga mendukung langkah DPKAD Kota Semarang untuk membawa persoalan ini ke meja hukum. "Harus tuntas karena uang yang hilang tersebut adalah uang milik rakyat," ujarnya.

Di sisi lain, dirinya tidak nampak kemungkinan akan meminta BTPN sebagai lembaga perbankan bertanggungjawab untuk segera menyelesaikan kasus ini.

"Kalau soal adanya tiga rekening baru atas nama Pemkot Semarang di BTPN, saya kurang tahu menahu. Coba Tanya Pak Yudi (kepala DPKAD) saja yang lebih rinci," pungkasnya. ■

rdi/Hid/lek-Ks